

BAB IV

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pengertian dan Asas-Asas kurikulum.

Pengertian Kurikulum secara tradisional diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun dalam perkembangan kurikulum sebagai suatu kegiatan pendidikan Kurikulum didefinisikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai , isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik⁷²,

Saylor dan Alexander merumuskan kurikulum sebagai “ *The total effort of the school to going about desired outcomes in school and out-school situations* (Syailor,1965. Hal 3) definisi ini menisyaratkan bahwa kurikulum tidak hanya sekedar meliputi mata pelajaran, tetapi segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, selain itu kurikulum tidak hanya mengenai situasi di dalam sekolah tetapi juga di luar sekolah.

⁷² www.depdiknas.go.id

Istilah "kurikulum" muncul pertama kali di bidang olahraga, berasal dari bahasa Latin: "*Curriculae*", yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelar.⁷³ Senada dengan hal tersebut Ahmad Tafsir mendefinisikan secara historis⁷⁴, yaitu suatu alat yang membawa orang dari *start* sampai *finish*. Pada perkembangannya istilah kurikulum kemudian dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam kamus *Webster* tahun 1856 kurikulum diartikan dengan dua macam, yaitu: *Pertama*, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu.

Sedangkan asas-asas yang menjadi dasar adanya kurikulum di antaranya:

- a. Asas filosofis, pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan
- b. Asas sosiologis, memberikan dasar untuk menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi, sehingga nantinya kurikulum dapat memberikan sumbangsi pada tatanan kehidupan masyarakat dan tidak menjadikan pendidikan kita bak menara gading yang lepas dari kontekstual kultur sosial bangsa ini.
- c. Asas Organisatoris, memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana

⁷³ Muhammad Joko susilo, *KTSP.....hal* 77.

⁷⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hal 53

bahan pelajaran di susun, bagaiman luas dan urutanya.

- d. Asas psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek serta cara belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna dan dikuasai oleh anak sesuai dengan taraf perkembangannya.

B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber-bahan-alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Mulai tahun pelajaran

2006/2007, Depdiknas meluncurkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau disebut juga Kurikulum 2006. KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum

dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar.⁷⁵

Kurikulum 2006 merupakan hasil kreasi guru-guru di sekolah berdasarkan standar isi dan standar kompetensi. Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional RI No 24 tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi itu kelak menandai diserahkannya kewenangan kepada guru untuk menyusun kurikulum baru. Dengan kata lain, KTSP lebih memberdayakan guru untuk membuat konsep pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Hal tersebut juga tentunya sejalan dengan kebijakan desentralisasi.

Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian

⁷⁵ Muhammad joko susilo... hal. 94

pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (*UU 20/2003*) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (*PP 19/2005*) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan acuan dan pedoman dalam mengembangkan kurikulum. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum secara nasional seperti periode sebelumnya. Tidak ada lagi kurikulum nasional seperti kurikulum 1984, 1994 dan sebagainya. Pemerintah hanya menetapkan SNP yang menjadi acuan sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Kini saatnya sekolah mengembangkan sendiri kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan potensi peserta didik, masyarakat dan lingkungannya.

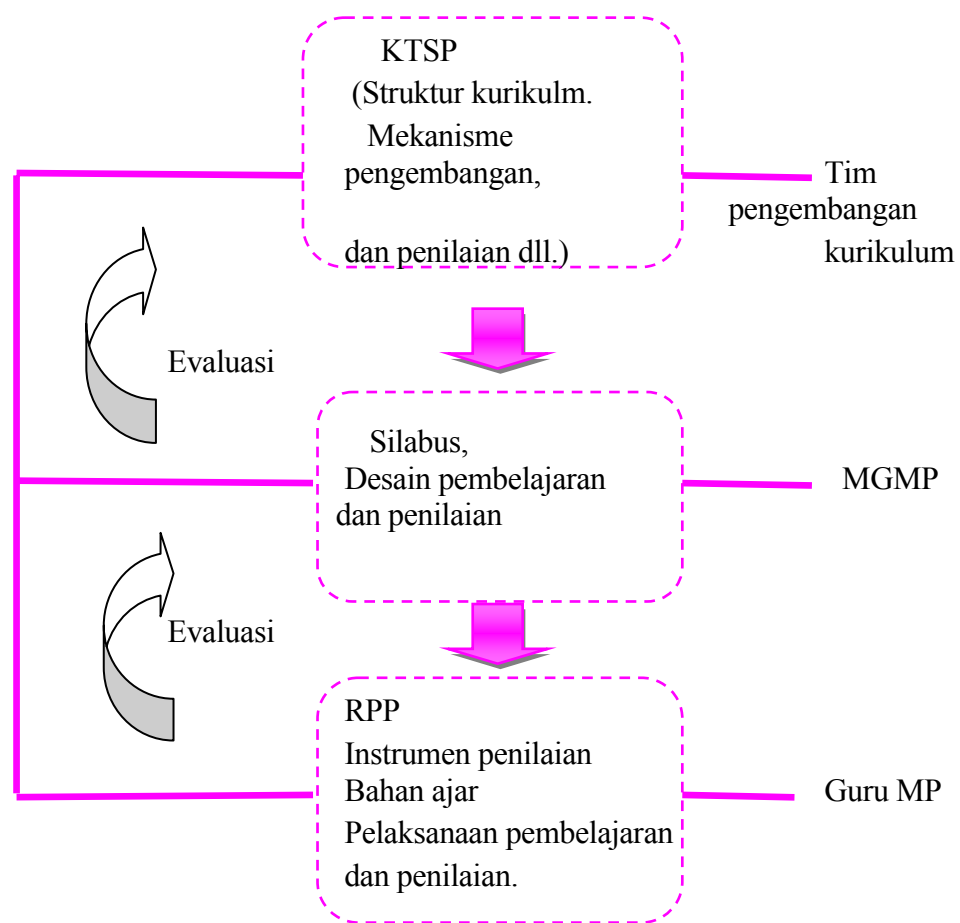
Orientasi KTSP disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan

peserta didik untuk :

- a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b) belajar untuk memahami dan menghayati,
- c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
- d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan
- e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Hasil pengembangan dituangkan dalam rancangan kegiatan pembelajaran dalam bentuk silabus dan desain pembelajaran, rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) lebih rinci, desain penilaian dan instrumennya, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu juga diperlukan adanya sintesa serta kerjasama dari masing-masing elemen dalam mekanisme kerja pengembangan kurikulum. Mekanisme kerja tim pengembang kurikulum, MGMP, dan guru mata pelajaran dapat dilihat dalam skema berikut:

Skema
Mekanisme tim pengembangan kurikulum
MGMP dan guru mata pelajaran.



C. Pengertian Pengembangan Kurikulum PAI.

Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan

suatu alat atau cara baru, dimana selama kegiatan tersebut terus dilakukan dengan penyempurnaan-penyempurnaan dan akhirnya cara tersebut dipandang untuk dilakukan.

Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu, pengembangan kurikulum berarti perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lain, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu panjang⁷⁶

Para pakar berbeda dalam mengartikan pengembangan kurikulum, satu antara lain mempunyai perbedaan dalam mengartikan pengertian pengembangan kurikulum diantaranya.

- a. Oemar Hamalik mengartikan pengembangan kurikulum dengan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik kearah perubahan perilaku yang di inginkan dan menilai hingga dimana perubahan-perubahan tersebut telah terjadi pada diri siswa yang bersangkutan⁷⁷
- b. Menurut caswell, pengembangan kurikulum sebagai alat untuk membantu guru dalam melakukan tugas mengajar bahan, menarik minat anak didik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁷⁶ Hendyat Soetopo dan Wast Soenanto, *pembinaan dan pengembangan kurikulum* (Jakarta: bumi aksara,1993), hal. 45

⁷⁷ Oemar Hamalik, *sistem dan prosedur pengembangan kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan*. (Bnadung: PT trigendi Karya,1993) hal .40

- c. Menurut Subandijah menjelaskan pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan, menghasilkan alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi yang lebih baik.

Dari pengertian para pakar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum menunjuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum, kegiatan ini lebih bersifat konseptual dari pada material, yang dimaksud dalam pengembangan ini adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan, yang selanjutnya menghasilkan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan.

Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam (PAI) dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengkaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama islam (PAI) yang lebih baik⁷⁸

D. Landasan pengembangan Kurikulum PAI.

Landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi titik tolak sekaligus titik sampai dari kurikulum, titik tolak berarti pengembangan kurikulum apat didorong oleh pembaharuan tertentu, seperti adanya perubahan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Sedangkan titik samapai kurikulum berarti kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat merealisasikan

⁷⁸ Subandiah, *pengembangan dan inovasi kurikulum* , (jakarta: PT, raja Grafindo Persada, 1996) hal. 36

perkembangan tertentu, seperti dampak kemajuan ilmu pengetahuan, perbedaan latar belakang siswa, tuntutan-tuntutan kultur tertentu, dan tuntutan sejarah masa lalu⁷⁹

Menurut Dr. Nana Sudjana, ada tiga landasan pokok dalam pengembangan kurikulum. Yaitu:

1. Landasan filosofis.

Landasan filosofis mempunyai maksud dan pentingnya filsafat dalam pengembangan kurikulum di sekolah, letak urgensitasnya adalah pada sifat berfikir secara menyeluruh, mendalam, dan sistematis tentang suatu kebenaran yang merupakan ciri dari filsafat. Bidang telaah filsafat awalnya mulai mempersoalkan siap manusia, mempersoalkan hidup, dan eksistensi manusia.

Dari kedua telaah tersebut, filsafat mencoba menelaah tiga persoalan pokok, yaitu hakekat benar salah (logika), hakikat baik buruk (Etika) yang merupakan telaah bidang nilai, dan hakikat indah jelek (estetika) merupakan telaah bidang seni, dalam hubungannya dengan kurikulum ketiga pandangan tersebut (ilmu, nilai dan seni) sangat diperlukan terutama dalam menetapkan arah dan tujuan pendidikan.

Dalam telaah terhadap eksistensi manusia, terhadap pandangan hidup manusia, dan setiap negara di dunia ini memiliki pandangan hidup

⁷⁹ Hendyat Soetopo dan Wast Soenanto, *pembinaan dan pengembangan kurikulum ...*, hal 46

masing-masing sebagai acuan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagi Indonesia, Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa, sehingga akan memunculkan anak didik menjadi manusia Pancasila, ini berarti arah dan landasan pendidikan adalah Pancasila.

2. Landasan psikologis

Pendidikan sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, sebab melalui pendidikan di tujukan dapat merubah pribadi menuju kedewasaan, naik fisik, mental, moral maupun sosial, kurikulum merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk mengubah perilaku manusia. Perubahan tersebut juga diakibatkan oleh faktor lingkungan dan kematangan diri manusia sendiri.

Ada tiga ciri tingkah laku manusia yang diperoleh sebagai hasil pendidikan, yakni: terbentuknya tingkah laku baru, berupa kemampuan aktual dan kemampuan potensial, yang mana kemampuan baru tersebut berlaku dalam relatif lama, dan diperoleh melalui usaha.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia, oleh sebab itu pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan.

Pentingnya landasan psikologis dalam kurikulum terutama dalam: 1) bagaimana kurikulum harus disusun. 2) bagaimana kurikulum dikembangkan. 3) bagaimana proses belajar siswa dalam mempelajari kurikulum.

3. Landasan sosial budaya.

Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya, dalam konteks ini siswa dihadapkan dengan bidang manusia, dibina, dan dikembangkan sesuai dengan nilai kebudayaan.

Manusia hidup selalu membawa nilai-nilai budayanya, baik budaya yang bersifat universal maupun budaya yang bersifat khusus, dengan kompleksitas budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga menjadi bagian dari budaya manusia, kurikulum sebagai program pendidikan harus bisa menjawab tantangan dan tuntutan tersebut, bukan hanya dari isi programnya, tetapi juga pendekatan dan strategi pelaksanaannya.

Disinilah letak pentingnya landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum PAI dengan harapan apa yang telah diprogramkan dalam kurikulum secara nasional, tidak hanya menjadi barang mati, dan bisa mengakomodir semua kebutuhan manusia terutama

anak didik dengan mencantumkan pemahaman tentang bahaya korupsi.

Disamping landasan-landasan pengembangan kurikulum di atas, terdapat pula landasan secara organisatoris sebagaimana di sampaikan oleh S. Nasution, yaitu sebagai kerangka umum program yang akan disampaikan kepada murid, sebab kurikulum sebagaimana dijelaskan diatas sebagai pengalaman dan kegiatan anak didik di bawah tanggung jawab guru dan sekolah,

D. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum PAI.

Drs.H.M Ahmad secara umum membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi delapan macam, antara lain:⁸⁰

1. Prinsip berorientasi pada tujuan.

Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu, yang mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.

2. Prinsip relevansi (kesesuaian)

Pengembangan kurikulum secara principle meliputi tujuan, isi dan sistem penyampaianya yang harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan

⁸⁰ Drs.H.M.Ahmad,dkk, *pengembangan Kurikulum* (bandunng : PT Pustaka setia,

keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Prinsip efisiensi dan efektivitas Pertimbangan segi efisiensi dan efektivitas

dalam pengembangan kurikulum menjadi prinsip yang tak terelakkan. Dari segi efisien harus mempertimbangkan pendayagunaan dana, waktu, tenaga dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Demikian juga keterbatasan fasilitas ruangan, sarana prasarana dan peralatan, harus digunakan secara tepat oleh siswa dalam rangka pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan siswa.

4. Prinsip fleksibilitas (keluwesan)

Kurikulum yang fleksibel mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, sehingga tidak menjadi statis atau kaku.

5. Prinsip kontinuitas (berkesinambungan)

Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, sehingga satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan dan tingkat perkembangansiswa.

6. Prinsip keseimbangan

Penyusunan dan pengembangan kurikulum memerhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan sub-program, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan.

7. Prinsip keterpaduan

Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip terpadu. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya dengan melibatkan semua pihak

8. Prinsip mutu

Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh standar mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan.

Sedangkan prinsip pengembangan KTSP yang dimuat dalam Panduan Penyusunan KTSP jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Tahun 2006, KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas

pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁸¹

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi senantiasa dikembangkan berdasarkan potensi peserta didik dalam memahami, menguraikan, dan menelaah problema korupsi, perkembangan korupsi

⁸¹ Prof. Oemar malik, manajemen Pengembangan Kurikulum, (bandung: remaja Rosdakarya, 2006) hal.124

untuk kepentingan peserta didik dan lingkungannya dalam mencegah perilaku korupsi dalam masyarakat.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

Substansi komponen dalam pengembangan diri peserta didik pada pendidikan antikorupsi adalah pengembangan sikap perilaku peserta didik ke arah mental dan perilaku antikorupsi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional - dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi - merupakan jaminan relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan dalam masyarakat yang menginginkan terciptanya tatanan nilai (antikorupsi) agar tidak dirusak dengan perilaku yang menafikan nilai-nilai agama, sosial, dan hukum.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi secara menyeluruh, komprehensif dan terintegrasikan dalam setiap komponen mata pelajaran, khususnya pendidikan agama Islam merupakan keniscayaan dari prinsip tersebut.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih rinci lagi, dalam hal acuan operasional penyusunan yang juga tertulis dalam UU Sisdiknas 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 3, KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun dengan memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat

perkembangan dan kemampuan peserta didik

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotorik) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

Setiap daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, *resources* dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.

5. Tuntutan dunia kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Pendidikan

perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh

karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

8. Dinamika perkembangan global

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. Kesenjangan Gender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender (*equality*). Selain itu juga, kesetaraan tersebut harus dikembangkan dalam mengelola proses belajar mengajar. Sehingga proses belajar mengajar lebih menekankan pada pengembangan individu secara keseluruhan, bukan dikotomi peserta didik berdasarkan gender ataupun jenis kelamin.

12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan Islam tentunya karakteristik nilai-nilai keislaman yang universal menjadi urgen untuk selalu dikembangkan⁸²

F. Faktor-faktor Yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum pendidikan agama islam (PAI) di antaranya :

1. Lembaga pendidikan

Ada dua pengaruh yang lahir dari lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum, yaitu pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangsi yang tidak sedikit terhadap isi kurikulum serta

⁸² .www.depdiknas.go.id, tanggal 24 Juni 2008

proses pembelajaran, di samping ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap isi kurikulum juga berpengaruh terhadap alat bantu dan media pendidikan.

2. Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan dimasyarakat, sebagai bagian dan agen dalam masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat di sekitar merupakan masyarakat yang homogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, atau pegawai dan sebagainya. Jadi sekolah disini di tuntut untuk melayani inspirasi-inspirasi yang ada dalam masyarakat

F. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Antikorupsi.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa *"pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional"*. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa *"kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik"*. Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa *"kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite*

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”.

Poin-poin yang terdapat dalam prinsip-prinsip di atas sangat menuntut adanya kurikulum yang senantiasa memiliki kesadaran terhadap problem kontemporer sesuai realitas serta arah perkembangan berbasis kontekstual. Peningkatan iman, takwa serta akhlak mulia merupakan landasan atau pondasi awal dalam menentukan arah kurikulum. Oleh karenanya pendidikan antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi sangat relevan terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam selanjutnya. Dimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa menjadi aspek fundamental dalam melahirkan *output* pendidikan Islam.

Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif.

Peningkatan akhlak mulia dalam tujuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada pendidikan antikorupsi pun menjadi titik

sentral, dimana peserta didik sebagai subjek yang senantiasa menginginkan keadaan diri yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada semua manusia. Selain itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta aspek agama dan dinamika perkembangan global juga dapat mengantarkan proses perkembangan kurikulum ke arah kurikulum kontekstual, seperti pendidikan antikorupsi.

Pendidikan Islam sebagai lembaga formal pendidikan (baca: sekolah) yang memiliki karakteristik nilai-nilai keislaman sudah barang tentu harus memiliki kesadaran (*sense*) terhadap fenomena dan problem kontekstual yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal materi pelajaran. Agama sudah barang tentu menjadi kekuatan spiritual-moral dalam menegakkan panji-panji kebenaran dan menolak setiap bentuk kemungkaran. Pada poin persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan dapat diderivasikan beberapa nilai-nilai kebangsaan yang telah dirusak dan dikotori oleh para koruptor. Maka dari itu proses melawan korupsi adalah suatu upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan hal tersebut harus diimplementasikan dalam tataran praktis dengan menerapkan persoalan kejahatan korupsi dan semangat antikorupsi sebagai bagian integral dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah.

Oleh karenanya terdapat dua opsi dalam upaya penerapan kebijakan antikorupsi, yang *pertama* adalah menjadikan persoalan korupsi menjadi satu

mata pelajaran yang didalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan dunia dari masa ke masa; proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan.

Adapun opsi yang *kedua* adalah pembahasan mengenai kejahatan korupsi disisipkan sebagai suplemen pada materi-materi pelajaran tertentu yang dianggap mendukung pembahasan tersebut, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama islam.(PAI) Materi-materi tersebut diajarkan agar dapat membangun nilai-nilai luhur, dan menekankan pada pembahasan dampak akibat kejahatan korupsi di beberapa negara dan sebagainya.

Adapun mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memilih opsi yang kedua tentang masuknya pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di sekolah, yakni memasukkan dan mensisipkan materi tentang korupsi kedalam salah satu mata

pelajaran, dan penulis pilih adalah mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI). Hal ini di dasarkan :

Pertama, bahwa dasar pendidikan islam yaitu ajaran islam. islam sendiri merupakan pandangan hidup yang berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, baik yang termuat dalam al-Qurán maupun sunnah rosul, semua ajaran islam di yakini mengandung kebenaran mutlaq yang bersifat transendental, universal dan eternal (abadi) sehingga secara aqidah di yakini oleh para pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia, artinya ajaran islam dapat memenuhi kebutuhan manusia dimana dan kapan saja, dan pendidikan islam sendiri harus dapat menjadi rujukan bagi umat islam untuk menyelesaikan problem-problem umat

Korupsi merupakan problem umat islam kontemporer, pendidikan islam harus bisa menejawantakan nilai-nilai anti korupsi dalam ajaran islam kedalam bentuk yang lebih kongkrit lagi. Sehingga fitroh ajaran islam yang *sholih lukulli zaman wal makan* (sesuai dengan dengan kebutuhan manusia dimana dan kapan saja) dapat memberikan sumbangsi yang nyata dalam penyelesaian persoalan umat kekinian.

Kedua, bahwa budaya korupsi di indonesia adalah permasalahan nilai dan moral pelakunya, sedangkan inti dari ajaran islam adalah perbaikan moral, sesuai dengan fitroh diutusny rosullah untuk memperbaiki moral kaum jahiliyyah.

Ketiga, realitas kurikulum dan materi-materi dalam pendidikan agama islam (PAI) belum menyentuk persolan-persolan real kebutuhan kontemporer, persolan korupsi selama ini belum di sentuh sama sekali di dalam materi pendidikan agama islam (PAI) ,

Pendidikan Islam lebih eksplisit lagi kurikulumnya sendiri jarang sekali diarahkan menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Buku-buku pelajaran cenderung yang diajarkan secara normatif, tidak diambil serta dikembangkan semangat berpikirnya, apalagi kemudian dikorelasikan pada kontekstualisasi kekinian, seperti kenapa terjadi budaya korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Sementara para pendidik sendiri hanya mencukupkan diri dengan berpedoman kepada buku-buku tersebut, tanpa pernah mengajarkan peserta didik bagaimana metode berpikir dan strategi menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul.

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan juga menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan, sedang umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Masalah dan sistem pendidikan menjadi kian penting dan strategis karena dapat dijadikan fundamen sosial guna mendorong proses transformasi masyarakat. Secara sintetik pendidikan antikorupsi berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, kohesi sosial, dan demokrasi. Lagi-lagi pendidikan (Islam) memiliki andil yang

cukup besar terhadap proses kemajuan suatu bangsa.

Untuk itu kurikulum pendidikan Islam perlu mengalami “kontektualisasi pendidikan”. Kontekstualisasi kurikulum pendidikan harus diupayakan sehingga dapat membangun peradaban masyarakat yang kritis, yang lebih adil, lebih manusiawi, *sense of crisis*, *sense of responsibility*, misalnya pada persoalan-persoalan kemanusiaan, lingkungan, pembelaan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak azasi manusia, dan sebagainya. Singkatnya sistem kurikulum pendidikan Islam pada masa kini dan mendatang harus lebih antisipatif terhadap problematika yang sedang berkembang, korelasi antara ideal dan kenyataan lebih signifikan.

Proses pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama islam (PAI) sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya. Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem-problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (*subject oriented curriculum*). Seperti materi dalam ilmu fikih, ushul fikih, dan sebagainya, pada pendefinisian

tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan *financial-private* dalam pengajaran fikih. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (*hirabah*) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-thariq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik-komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik. Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang, diantaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptor dengan cara yang beda.

Korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan *state capture corruption* atau *state-hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara.

Kekuasaan negara telah ‘menghamba’ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada point inilah materi fiqih dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqih negara⁸³

Integritas atau amanah para pemimpin negara terlihat jelas penyelewengannya terhadap korporatokrasi. Bagaimana pun kepercayaan rakyat tidak bisa digadaikan begitu saja kepada pihak asing dengan cara menjual aset-aset nasional yang notabene sebagai sumber daya alam bagi bumi Indonesia. Eksploitasi alam termasuk dalam materi bagaimana *hablum minal ‘alam* seharusnya diarahkan untuk eksplorasi, bukan eksploitas *State capture corruption* adalah jenis korupsi yang super destruktif dan berskala negara. Kejahatan ini muncul ketika terjadi persekongkolan antara negara dan korporasi, dimana kekuatan korporasi menaklukkan kekuatan negara sehingga negara menjadi pelayan kepentingan korporasi. Selain itu juga, *state capture corruption* ternyata mengejawantahkan dalam pembelian berbagai dekrit politik dan pembuatan undang-undang oleh sektor korporat dan penyalahgunaan wewenang dalam mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi. Hal inilah yang sangat urgen untuk diinternalisasikan kepada peserta didik dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam agar kejahatan korporasi yang telah menyelewengkan

⁸³ Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008) hal 176-182

nilai amanah dan kejujuran dapat ditekan.

Materi akhlak juga masih dikonsentrasikan pada pengajaran dan identifikasi teoritis akhlak yang terpuji. Materi akidah pun masih berkisar tema-tema keimanan secara transendental minus kontekstualisasi dan pengaitan dengan realitas sosial serta hampir tanpa penafsiran ekstensif terkait dengan aspek sosial-horizontal. Terlebih lagi, mengaitkan nilai-nilai abstrak dengan perilaku dan realitas kecenderungan kekuasaan materil dan politik manusia sebagai khalifah Allah yang jika tidak dikontrol secara sistematis akan bersifat manipulatif dan korup.

Oleh karena itu, harus ada keinginan kuat untuk selalu menselaraskan desain kurikulum dan proses pembelajaran serta pengayaan materi dengan persoalan kontemporer masyarakat, sehingga kurikulum dan proses pembelajaran dapat diintegrasikan dan dikontekstualisasikan dengan wacana dan masalah sosial yang aktual dan relevan disertai oleh strategi pembelajaran yang variatif, inovatif dan transformatif